Rp363M Anggaran Pilkada 2020 Kalbar

PONTIANAK, SP – Anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tujuh kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, pada Pilkada serentak 2020, diperkirakan menghabiskan uang Rp363 miliar lebih.

Jumlah ini berdasarkan usulan kebutuhan biaya pelaksanaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)

• **Baca Halaman 7**

Usulan Dana Pilkada Serentak Kalbar 2020

KPU Ketapang	Rp46 Miliar
KPU Melawi	Rp31,4 Miliar
KPU Sekadau	Rp25,5 Miliar
KPU Kapuas Hulu	Rp43 Miliar
KPU Bengkayang	Rp40 Miliar
KPU Sambas	Rp57 Miliar
KPU Sintang	(belum terkonfirmasi)
Bawaslu Ketapang	Rp24 Miliar
Bawaslu Melawi	Rp12 Miliar
Bawaslu Sekadau	Rp10,9 Miliar
Bawaslu Kapuas Hulu	Rp17,5 Miliar
Bawaslu Bengkayang	Rp13,8 Miliar
Bawaslu Sambas	Rp21,9 Miliar
Bawaslu Sintang	Rp20 Miliar

Sumber: Pengolahan data dan keterangan.

Dedi Suparjo
Ketua KPU Melawi

Bila nantinya ada pengurangan dari Pemkab, ya tentu kita juga akan menyesuaikan.

dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada pemerintah daerah, minus usulan anggaran dari KPU Sintang yang hingga Jumat (2/8) malam, belum terkonfirmasi *Suara Pemred*.

Tujuh daerah yang mengadakan pesta demokrasi 2020, Kapuas Hulu, Ketapang, Melawi, Sekadau, Bengkayang, Sambas dan Sintang.

Anggaran penyelenggaraan Pilkada terbesar dari KPU Sambas dengan pengajuan anggaran Rp57 miliar, disusul KPU Ketapang sebesar Rp46 miliar.

Ketua KPU Ketapang, Tedi Wahyudin mengatakan angka Rp46 miliar itu sudah dirapatkan dengan Pemda dan DPRD Ketapang. Saat ini, usulan itu masih dalam pembahasan di internal Pemda.

"Kita masih menunggu hasilnya," katanya, Jumat (2/8).

KPU Melawi berada di pertengahan dengan usulan anggaran Rp31,4 Miliar. Dana ini akan digunakan untuk membiayai seluruh tahapan Pilkada. Nilai ini naik dua kali lipat dari dana pelaksanaan Pilkada pada 2015.

"Anggaran tersebut digunakan untuk seluruh tahapan. Mulai dari persiapan dan pelaksanaan, pembentukan badan adhoc dari PPK sampai KPPS, honorarium penyelenggara Pemilu, pengadaan logistik, hingga fasilitasi kampanye pasangan calon (Paslon) nantinya," kata Ketua KPU Melawi, Dedi Suparjo.

Angka ajuan naik, salah satunya karena regulasi logistik yang seluruhnya akan dilakukan pengadaan baru. Semua logistik Pemilu serentak lalu tak bisa dipakai karena dianggap barang habis pakai. Termasuk kotak dan bilik suara.

Di Pilkada 2015 lalu, kotak dan bilik suara masih menggunakan logistik Pemilu sebelumnya yang berbahan aluminium. Namun saat ini, dua barang itu harus memakai bahan kardus, dan harus melalui pengadaan logistik Pilkada 2020.

Penyebab lain, adanya usulan penambahan honorarium untuk jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Bagaimanapun mereka adalah ujung tombak pelaksanaan Pemilu di lapangan," katanya.

Dana Pilkada ini, kata Dedi, digunakan pula untuk pemutakhiran data pemilih serta honor petugas pemutakhiran, penyelenggaraan sosialisasi, dan bimbingan teknis.

Usulan dibuat sedetail dan seriil mungkin.

"Harapan kita Pemda bisa mengkaji dan menerima usulan tersebut," katanya.

Dedi menjelaskan pembahasan anggaran harus dilakukan tahun ini karena tahapan Pilkada 2020 sudah dimulai sejak November 2019. Namun sejauh ini belum ada rapat atau pertemuan dengan Pemkab Melawi terkait usulan anggaran Pilkada tersebut.

"Kita menghitung kebutuhan Pilkada dengan jumlah TPS sebanyak 550 TPS. Ini juga bagian dari upaya kita mengefisiensi anggaran. Mengapa tak sama dengan Pemilu Serentak lalu yang sampai 707 TPS, karena hitung-hitungan kita, dalam satu TPS bisa sampai 800 an pemilih," jelasnya.

Anggaran yang diusulkan ke Pemda, merupakan hasil perhitungan di internal KPU. Angka Rp31,4 miliar ini merupakan proyeksi sementara kebutuhan Pilkada 2020. Dana yang diusulkan memang diupayakan untuk memaksimalkan seluruh tahapan Pemilu.

"Bila nantinya ada pengurangan dari Pemkab, ya tentu kita juga akan menyesuaikan. Misalnya akan ada tahapan yang dihilangkan seperti mungkin sosialisasi sampai ke desa. Karena dananya kurang, cukup sampai kecamatan," katanya.

KPU Sekadau mengusulkan Rp25,5 miliar. Angka itu sudah dibicarakan dengan Pemkab setempat.

"Usulan kita berkisar Rp25,5 miliar. Kalau tentang rincian kebutuhannya itu meliputi administrasi, teknis dan honorium petugas," ujarnya.

Anggaran terbesar berada di pos honorarium petugas dan teknis. Semuanya penting dalam tahapan dan kinerja demi menyukseskan Pilkada. Jika melihat anggaran Pilkada sebelumnya, memang Pilkada mendatang lebih besar.

"Karena dari sisi kebutuhan sangat tinggi dengan alasan barang-barang pada naik, dan masalah teknis lainnya sehingga anggaran itu menjadi lebih besar," paparnya.

Penentuan angka itu pun berpatokan pada evaluasi Pilkada sebelumnya. Apabila diajukan tak terealiasasi, akan ada pembahasan lanjutan.

"Nanti akan ada pertemuan selanjutnya, dan kita bahas secara intens bersama pemerintah, sehingga adanya kebijakan yang baik," katanya.

Di Bengkayang, KPU setempat mengajukan dana Rp40 miliar ke pemerintah. Angka ini memang melejit jika dibandingkan Pemilu 2015 yang hanya menelan Rp15 miliar.

Ketua KPU Bengkayang, Musa Jairani menjelaskan anggaran tersebut akan digunakan untuk seluruh tahapan Pilkada. Mulai dari pengadaan bilik suara, kotak suara, serta anggaran verifikasi sistem sensus pendaftaran bagi calon perseorangan atau independen.

Dalam proses persiapan, KPU kini sedang membuka kotak suara form A-DPK sebagai persiapan untuk pemutakhiran data pemilih.

"Semoga seluruh persiapan data dan pemutakhiran data pemilih berjalan dengan baik, tentunya hal ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi semua pihak," tutupnya.

Bawaslu Ajukan

Dari data sementara yang dihimpun *Suara Pemred*, Bawaslu Ketapang jadi pengusul anggaran tertinggi untuk Pilkada Serentak 2020 di Kalbar. Angkanya mencapai Rp24 miliar.

"Sudah kita ajukan dan saat ini tinggal menunggu tim TAPD untuk dibahas lebih lanjut," kata Ketua Bawaslu Ketapang, Nuryanto.

Anggaran yang diajukan nantinya akan dipergunakan untuk berbagai item. Baik tingkat kabupaten hingga ke pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Untuk anggaran Pilkada sebelumnya kita kurang tahu karena tahun 2015 lalu. Yang jelas harapan apa yang kita ajukan bisa disetujui dan terealisasi," katanya.

Sementara Bawaslu Melawi mengusulkan Rp12 miliar ke Pemkab untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2020. Selain untuk honor, pemakaiannya juga untuk sewa kantor dan operasional lapangan.

Meski demikian, Ketua Bawaslu Melawi akan tetap menerima berapa anggaran yang nantinya direalisasikan Pemkab. Namun, bila dana yang dikucurkan minim, dia mewanti-wanti akan berpengaruh pada pengawasan Pemilu.

"Bila tak sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan, hasil kerja tentu akan terpengaruh karena tidak bisa maksimal dalam melakukan pengawasan dan monitoring pada jajaran di bawah," ujarnya.

Dari semua Bawaslu yang wilayahnya menggelar Pilkada Serentak 2020 di Kalbar, Sekadau jadi yang paling kecil usulannya. Mereka hanya menganggarkan Rp10,9 miliar. Malah di Pilkada sebelumnya, anggaran mereka cuma Rp3,6 miliar.

"Pilkada sebelumnya hanya Rp3,6 miliar, tidak sampai Rp5 miliar. Tentu anggaran yang

kita ajukan pada tahun 2020 berkembang dengan situasi dan kebutuhan yang ada," Ketua Bawaslu Sekadau, Nur Soleh.

Dalam persiapannya, di tahap pertama, Bawaslu daerah didampingi Bawaslu Kalbar meninjau ulang setiap mata anggaran pada rapat yang diselenggarakan 6 Februari 2019. Di tahap kedua, Bawaslu kabupaten/kota se-Kalbar diundang Bawaslu RI pada Rapat Asistensi dan *review mapping* Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 di Surabaya beberapa waktu setelahnya.

Pemerintah Kaji

Pemerintah daerah di tujuh kabupaten tersebut hingga kini masih mengkaji usulan dana Pilkada 2020. Salah satunya Pemda Ketapang yang masih melakukan proses verifikasi.

"Pengajuannya memang sudah ada, tapi saat ini masih dalam proses pembahasan dan verifikasi di tim internal Pemda," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang, Farhan.

Verifikasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hasilnya akan diteruskan kepada Bupati dan menjadi dasar usulan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kemudian jadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang lantas dibahas bersama DPRD.

"Yang jelas Pemda mendukung dan memprioritaskan ajuan itu untuk menyukseskan pesta demokrasi. Namun disesuaikan dengan aturan dan keuangan daerah," katanya.

Terpisah, untuk pengajuan dana Pilkada 2020 di Sambas, DPRD setempat sudah menerima tembusan usulan dari KPU sebesar Rp57 miliar. Setelah mendapatkan surat tersebut, pimpinan DPRD Sambas sudah membuat surat disposisi untuk mempelajari usulan dana.

"Saya dapat informasi, KPU sudah duduk satu meja dengan eksekutif (Pemkab Sambas) membahas tentang usulan dana tersebut," kata Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Arifidiar.

DPRD Sambas sendiri berencana rapat bersama KPU untuk membahas ajuan tersebut.

"Karena sifatnya adalah anggaran mengikuti program, sehingga alangkah lebih baiknya penganggaran bersifat kegiatan. Misalnya di tahun ini sudah ada tahapan Pilkada yang dimulai, bisa saja dianggarkan. Dan memang informasi yang saya dapat, memang demikian yang dibicarakan KPU dengan Pemkab," katanya. **(akh/eko/noi/nar/teo/sap/bls)**